

LKJIP



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Dr. Sutomo No. 53 Blitar Telp/Fax (0342) 801243

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan **“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2023”** dapat disusun dan diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*.

Penyusunan LKJIP Tahun 2023 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar berpedoman pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan berbagai kewajiban tugas pokok dan fungsinya.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat serta berbagai pihak yang berkepentingan terkait hasil pelaksanaan program/kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan. Semoga bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Blitar, 29 Februari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BLITAR

Ir. SETIYANA, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680810 199703 1 003



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan **"Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2023"** dapat disusun dan diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*.

Penyusunan LKJIP Tahun 2023 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar berpedoman pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan berbagai kewajiban tugas pokok dan fungsinya.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat serta berbagai pihak yang berkepentingan terkait hasil pelaksanaan program/kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan. Semoga bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Blitar, 29 Februari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BLITAR



Ir. SETIYANA, MM.
Pemuda Muda
NIP. 196808101997031003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum SKPD	2
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan.....	7
D. Landasan Hukum Penyusunan	8
E. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026	11
B. Perjanjian Kinerja 2022	15
C. Program dan Kegiatan	16
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar untuk Tahun 2022 telah menyusun program dan kegiatan sebagai berikut.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
B. Realisasi Anggaran.....	38
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, pengaruh globalisasi dan akses informasi yang tak terbatas dari sosial media.

Dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, yang profesional, bersih, berwibawa dan bersikap mental positif melalui program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan, teknik yang efektif dan sistem administrasi modern.

Setiap pelaksanaan urusan pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tiga pilar utama yaitu, Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas merupakan salah satu azas dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana azas tersebut memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Subtansi dari SAKIP itu sendiri adalah menyelaraskan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan berorientasi pada hasil (*result oriented*). Penyelarasan dilakukan mulai dengan penyusunan Rencana Strategis dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kerja Tahunan / Perjanjian Kinerja yang merupakan kontrak kerja serta laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya.

LKJIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



yang merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Target kinerja yang harus dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar tahun 2023, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Evaluasi SAKIP Tahun 2022 telah dijadikan masukan perbaikan pada LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023. Perbaikan yang dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, pelaporan kinerja hingga evaluasi kinerja. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar melakukan berbagai langkah dalam meningkatkan nilai SAKIP antara lain 1) Melaksanakan pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara berkala; 2) Meningkatkan kualitas laporan kinerja 3) Melaksanakan Evaluasi Ekuntabilitas Kinerja secara keseluruhan dan 4) Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap hasil evaluasi internal untuk dapat mengawal perbaikan kinerja dalam rangka mewujudkan kinerja utama (outcome) organisasi yang lebih baik.

B. Gambaran Umum SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.



Sedangkan susunan organisasi dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 125 Tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yang mempunyai tugas :

“Membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik”

Dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar memiliki fungsi :

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisis data untuk menyusun program kegiatan;
- b. perencanaan strategis pada Badan;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- d. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan;
- i. pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- j. pengoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. pembinaan dan pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Disamping itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategik yakni kondisi, situasi,



peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Isu-isu strategis tersebut dapat berupa informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian juga dengan faktor internal dan eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

Adapun permasalahan terkait tugas pokok dan fungsinya yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi diantaranya :

- a. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah.
- b. Masih sering terjadinya konflik horizontal di masyarakat yang berkaitan dengan IPOLEKSSOBUD.
- c. Tingkat kesadaran masyarakat dalam partisipasi politik masih rendah.
- d. Masih rendahnya partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam mendukung program – program pemerintah daerah

Strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar merupakan langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan misi yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan strategi yaitu:

- a. Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan dan bernegara berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.
- b. Peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan politik dan kehidupan politik serta perluasan informasi publik.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan kamtibmas.
- d. Pemberdayaan Ormas/LSM dalam rangka pembangunan di daerah.

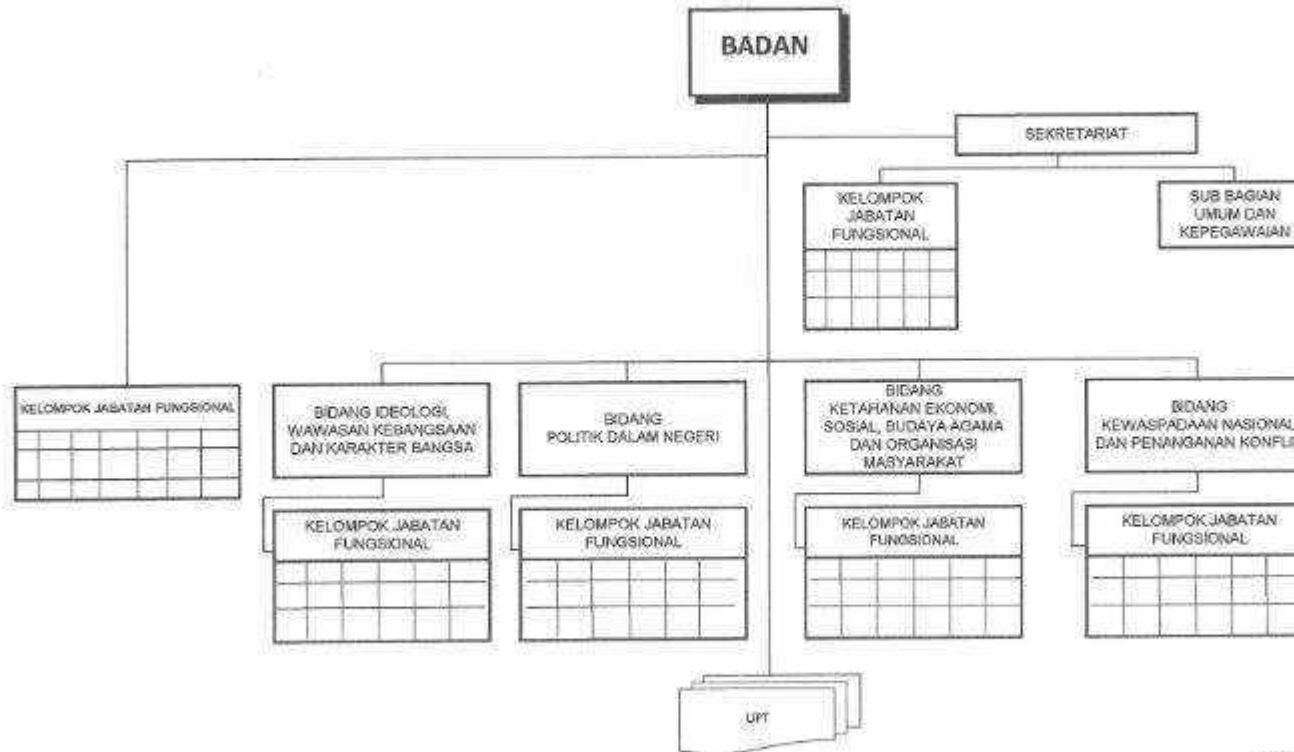
Dengan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar tersebut di atas, maka arah kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah :

- a. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui pembinaan ketahanan ideologi, sosial, budaya dan wawasan kebangsaan.
- b. Peningkatan partisipasi politik masyarakat melalui pendidikan politik.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban melalui forum-forum (FKDM, Tim Wasdin, FKUB dan FPK).
- d. Peningkatan pembinaan terhadap Ormas/LSM melalui sosialisasi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 125 Tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, maka ditetapkan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - (1) Sub Umum dan Kepegawaian; dan
 - (2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BLITAR**



BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2023, serta sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar. Pelaporan Kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah sebagai laporan hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar. LkjIP juga merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar.



D. Landasan Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2023 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- r. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
- s. Peraturan Bupati Blitar tentang
- t. Peraturan Bupati Blitar Nomor 125 Tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar.

E. Sistematika Penyajian

LKjIP ini bertujuan untuk mengkomunikasikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar selama tahun 2023. Capaian Kinerja (*Performance Result*) pada tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan dalam tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar. Analisis atas Capaian Kinerja terhadap Rencana Kinerja ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika Penyajian LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum SKPD
- C. Maksud dan Tujuan Penyusunan
- D. Landasan Hukum Penyusunan
- E. Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Perjanjian Kinerja
- B. Perubahan Anggaran dan Kegiatan

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 didasarkan pada : (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026; (2) Peraturan Bupati Blitar Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; (3) Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026; (4) Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 – 2026; dan (5) Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023;

A. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026

1. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2021 - 2026

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

***”TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN
SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA BALDATUN,
THOYYIBATUN, WA ROBBUN GHOFUUR”.***

Target utama visi pembangunan periode 2021-2026 adalah mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Kabupaten Blitar dengan bernaafaskan semangat baldatun, thoyyibatun wa robbun ghofuur. Secara harfiah frasa baldatun, thoyyibatun wa robbun ghafuur berarti: “Negeri yang baik dengan Rabb Yang maha pengampun”. Makna “Negeri yang baik (Baldatun Thoyyibatun)” bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya, dan “Rabb yang maha pengampun (Rabbun Ghafuur)” bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya sehingga mendatangkan ampunan dari Allah SWT. Semangat kemandirian dan



kesejahteraan tersebut secara teknis dapat diintervensi melalui, pertama, masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan, dan, kedua, pemerintah sebagai pelaksana pembangunan.

Sementara itu, misi Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya;
2. Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar;
3. Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas;
4. Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2021 – 2026 tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung Misi I Kabupaten Blitar yaitu

“Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya”.

Misi I Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan kesejahteraan dan harmonisasi sosial yang diwujudkan melalui sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat. Pemerintahan sebagai penyedia perlindungan dan penjaminan sosial kepada PMKS, masyarakat ikut terlibat dalam menciptakan Masyarakat yang Harmonis, Religius serta berbudaya di Kabupaten Blitar. Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar berperan dengan cara mewujudkan wilayah Kabupaten Blitar yang aman dan kondusif serta saling

menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kerangka NKRI.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi I ditetapkan tujuan yaitu Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

1. Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
2. Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat

Sesuai tugas dan fungsinya Bakesbangpol Kabupaten Blitar mendukung sasaran ke 2 dengan yaitu Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat dengan indikator Indeks Kesalehan Sosial, dimana tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar adalah Mewujudkan stabilitas wilayah di bidang IPOLEKSOSBUD (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya).

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar mengampu Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kesalehan Sosial bersama Perangkat Daerah Urusan Trantibum Linmas, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Perangkat Daerah yang menangani Urusan Data dan Statistik dan Kecamatan. Dalam hal penghitungan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2023, Bakesbangpol Kabupaten Blitar berperan sebagai sumber data, sementara untuk kegiatan penghitungannya berada pada Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar. Adapun capaian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Target dan Realisasi Indikator Kesalehan Sosial
Kabupaten Blitar Tahun 2021 s.d 2023

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	80 (Sangat Tinggi)	81,74 Sangat Tinggi)	82 (Sangat Tinggi)	84,09 (Sangat Tinggi)	84* (Sangat Tinggi)	84,23 (Sangat Tinggi)

**Keterangan : Target sesuai dengan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026*

3. Tujuan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang hendak dicapai dalam jangka menengah yakni 1 tahun sampai kurun waktu 5 tahun. Tujuan yang ditetapkan atas dasar pernyataan visi dan misi organisasi serta didasarkan atas isu analisis strategis.

Penetapan tujuan dalam perencanaan stratejik didasarkan pada faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) dari hasil analisis lingkungan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar menetapkan tujuan OPD adalah

“Penguatan karakter Pancasila melalui kesalehan sosial untuk mewujudkan stabilitas wilayah di bidang IPOLEKSOSBUD (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya)”

dengan Indikator tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar

NO.	TUJUAN RENSTRA OPD	URAIAN INDIKATOR
1.	Penguatan karakter Pancasila melalui kesalehan sosial untuk mewujudkan stabilitas wilayah di bidang IPOLEKSOSBUD (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya)”	Indeks Kesalehan Sosial
		Persentase stabilitas di bidang IPOLEKSOSBUD (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya)
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar;

Indikator Kinerja Utama (*outcome*) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang menunjukkan peran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dalam hal Pembinaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar. Penentuan Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan dalam mendukung program-program yang akan dilaksanakan. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan yang dicapai oleh program sedang keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (*output*).

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar untuk tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar

NO.	SASARAN RENSTRA OPD	URAIAN INDIKATOR
1.	Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa	Indeks Kesalehan Sosial
2.	Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat
3.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi	Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi
4.	Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar	Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kab.Blitar

B. Perjanjian Kinerja 2023

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi rencana kinerja tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai implementasi pelaksanaan dari program. Target tersebut

dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2023	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2022	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023
1.	Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa	Indeks Kesalehan Sosial	84	84,09	84
2.	Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	90%	90%	90%
3.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi	Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi	75%	70%	75%
4.	Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar	Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kab.Blitar	BB (75)	BB (71,39)	BB (75)

C. Program dan Kegiatan

Pencapaian 4 (empat) sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar untuk Tahun 2023 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 di atas dicapai melalui 6 (enam) program pembangunan sebagaimana tertuang pada Tabel 2.5

Tabel 2. 5 Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

No	IKU	Program	Target Tahun 2023	Anggaran Tahun 2023
1.	Indeks Kesalehan Sosial	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80%	1.345.132.750
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	82%	260.467.000
2.	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	90%	782.702.000
3.	Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	75%	35.809.011.200
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	27%	3.214.470.000
4.	Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kab.Blitar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	3.154.992.370

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program ini merupakan program yang mendukung aktivitas perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar. Pada program ini terdapat 6 kegiatan dan 10 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
 - a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi pelaksanaan akuntansi SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

II. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

- 1. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan



- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Sejarah Kebangsaan.

III. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

IV. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- a. Pelaksanaan koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;

- b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
- c. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

V. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.

VI. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- a. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Tahun 2023 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2023 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar.

Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2023 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar.

1. Perbandingan antara target realisasi dan realisasi kinerja tahun 2023 dan tahun sebelumnya

Perbandingan antara target realisasi dan realisasi kinerja tahun 2023 dan tahun sebelumnya serta perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Kinerja 2022

NO.	SASARAN RENSTRA OPD	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2022	2022	2022
1	Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat	tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	90%	90%	100%
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dengan penguatan infrastruktur demokrasi	tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan/atau pemilukada	70%	70%	100%

Sumber: Renstra Bakesbangpol Tahun 2021-2026

Tabel 3. 2 Target dan Realisasi Kinerja 2023

NO.	SASARAN RENSTRA OPD	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2023	2023	2023
1	Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa	Indeks Kesalehan Sosial	84	84,23	100,27%



NO.	SASARAN RENSTRA OPD	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2023	2023	2023
2	Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	90%	90%	100%
3	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi	Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi	75%	75%	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar	Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kab. Blitar	BB (75)	BB (75,16)	100%

Sumber: Renstra Perubahan Bakesbangpol Tahun 2021-2026

Berdasarkan Tabel 3.1 dan Tabel 3.2, pada tahun 2022 dan 2023 terdapat perbedaan sasaran Renstra pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar. Hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2022 terdapat Penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 dan perubahan nomenklatur pada Bakesbangpol Kabupaten Blitar dari sebelumnya Peraturan Bupati Blitar Nomor 4 Tahun 2011 menjadi Peraturan Bupati Blitar Nomor 125 Tahun 2022.

Pada tahun 2022, terdapat 2 (dua) sasaran yaitu meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dengan penguatan infrastruktur demokrasi, sementara itu pada tahun 2023, menjadi 4 (empat) sasaran yaitu meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa, Meningkatkan penanganan konflik sosial di masyarakat, meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi dan Meningkatkan akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar

2. Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa Tahun 2023, pengukuran, evaluasi pencapaian dan analisis kinerja dilakukan pada setiap sasaran strategis pembangunan sesuai dengan perjanjian kinerja yang penyusunannya mendasarkan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 dan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021–2026.



a. Target dan realisasi Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa

IKU	Realisasi		Capaian 2023		
	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kesalehan Sosial	81,74	84,09	84	84,23	100,27%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023					100,27%

Indeks Kesalehan Sosial merupakan salah satu indikator yang mendukung pencapaian visi misi Bupati Blitar. Sehingga dilakukan pengukuran Indeks Kesalehan Sosial untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana tingkat kesalehan sosial di Kabupaten Blitar. Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar mengampu Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kesalehan Sosial bersama Perangkat Daerah Urusan Trantibum Linmas, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Perangkat Daerah yang menangani Urusan Data dan Statistik dan Kecamatan. Dalam hal penghitungan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2023, Bakesbangpol Kabupaten Blitar berperan sebagai sumber data, sementara untuk kegiatan penghitungannya berada pada Dinas Kominfo Kabupaten Blitar.

Sasaran strategis “Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa” ini dijalankan dengan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi: Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Pencapaian dari sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator yaitu Indeks Kesalehan Sosial. Pada Tahun

2023, Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Blitar tercapai sebesar 84,23 dari target 84, sehingga presentase capaian terhadap target tahun 2023 sebesar 100,27%. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Kesalehan Sosial telah mencapai target yang telah ditentukan dengan kategori sangat tinggi.

Adapun dimensi yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Blitar Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Kerjasama terdiri dari 2 (dua) sub dimensi yaitu Kontribusi dan Totalitas Kerja
- b. Solidaritas Sosial terdiri dari 2 (dua) sub dimensi yaitu Sikap Peduli (Caring) dan Sikap Memberi (Giving).
- c. Toleransi terdiri dari 2 (dua) sub dimensi yaitu Menghargai Perbedaan dan Menerima Multikultural
- d. Ketertiban Umum terdiri dari 5 (lima) sub dimensi yaitu Keterlibatan dalam Demokrasi, Tata Pemerintahan yang Baik, Pencegahan Kekerasan, Konservasi Lingkungan dan Restorasi Lingkungan.

Dari 4 (empat) dimensi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar masuk dalam dimensi sebagai berikut :

- a. Toleransi dengan sub dimensi Menghargai Perbedaan dan Menerima Multikultural;

Sebagai negara yang mempunyai budaya dan latar belakang yang heterogen, Keragaman dan semangat primordialisme antar penganutnya menjadi sebuah ancaman sekaligus kekuatan dalam stabilitas negara. Terlaksananya komunikasi serta koordinasi antar anggota FKUB dalam rangka penanganan/penyelesaian masalah-masalah keagamaan, konflik antar dan inter umat beragama di Kabupaten Blitar sehingga tingkat kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Blitar cukup kondusif. Peningkatan kapasitas kelembagaan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) di Kabupaten Blitar pada Tahun 2023 berupa kegiatan rapat koordinasi yang membahas isu – isu strategis terkait kerukunan umat beragama serta rapat koordinasi

yang membahas isu – isu strategis terkait pembauran kebangsaan di Kabupaten Blitar.

- b. Ketertiban umum dengan sub dimensi Keterlibatan dalam Demokrasi.

Dalam upaya meningkatkan Keterlibatan dalam Demokrasi masyarakat Kabupaten Blitar, pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada pemilih pemula dan perempuan yang dilaksanakan di SMA 1 Kesamben.

Tabel Perbandingan Nilai Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Blitar dengan Nasional dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

No	Wilayah	Nilai IKS 2023
1.	Kabupaten Blitar	84,23
2.	Nasional	82,59
4.	Kabupaten Sumenep	83,36
5.	Kabupaten Jombang	87,43
6.	Kota Mojokerto	95,08

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Provinsi Jawa Timur, Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Blitar relatif lebih tinggi dari Nasional dan Kabupaten Sumenep, namun lebih rendah dari Kabupaten Jombang dan Kota Mojokerto. Hal ini dikarenakan faktor – faktor yang mempengaruhi Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2023 antara lain usia, tingkat pendidikan, kategori responden serta kedekatan dengan organisasi keagamaan.

b. Target dan realisasi Sasaran Strategis 2:

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat

IKU	Realisasi		Capaian 2023		
	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	90%	90%	90%	90%	100%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2023					100%

Menurut Undang – Undang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Sasaran strategis “Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat” ini dijalankan dengan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi: Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Pencapaian dari sasaran strategis ini diukur dengan indikator yaitu tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat. Pencapaian Kinerja sasaran pada tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat penanganan konflik sosial di Masyarakat telah mencapai target

yang telah ditentukan. Adapun hasil ini dapat dijelaskan dari formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah konflik sosial di masyarakat yang ditangani}}{\text{Jumlah konflik sosial yang terjadi}} \times 100$$

$$= \frac{11}{11} \times 100 = 100\%$$

Pada tahun 2023 jumlah kejadian yang menonjol yang terjadi sebanyak 11 kejadian dan dari 11 kejadian tersebut semuanya dapat terselesaikan dengan mediasi dan koordinasi dengan pihak – pihak terkait. Adapun kejadian menonjol pada tahun 2023 adalah permasalahan redistribusi tanah Perkebunan Branggha Banaran, ledakan bahan petasan di salah satu rumah warga Desa Karangbendo, Kec. Ponggok yang mengakibatkan kerusakan rumah disekitarnya dan warga Kel. Babadan, Kec. Wlingi didampingi oleh LSM GPI yang mengeluhkan keberadaan Tower Telekomunikasi milik PT. Dayamitra Telekomunikasi karena dampak buruk keberadaan tower dan meminta agar perijinan tower dicabut, penolakan perobohan tugu pencak silat, aksi unjuk rasa oleh Masyarakat Peduli Kabupaten Blitar yang menuntut ditutupkan tambang ilegal di Blitar Selatan dan Kejadian Orang Meninggal Dunia di Kamar Mandi Umum Pondok Nuswantoro (Dulu bernama Padepokan Nur Dzat Sejati) pimpinan Sdr. Samsudin. Namun dengan kesigapan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, kejadian menonjol dan berpotensi konflik tersebut dapat dicegah dengan cara mediasi dengan pihak yang bertikai sehingga tidak sampai menimbulkan keresahan di masyarakat.

c. Target dan realisasi Sasaran Strategis 3 :

Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi.

IKU	Realisasi		Capaian 2023		
	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi	70%	70%	75%	75%	100%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2023					100%

Infrastruktur demokrasi adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat merubah hidup mereka dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Fasilitas dasar yang dimaksud adalah masyarakat, partai politik, pemerintah, legislative (DPR/D), pendidikan politik, penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu, kelompok kepentingan, media.

Sasaran strategis “Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi” ini dijalankan dengan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi: Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dan Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Pencapaian dari sasaran strategis ini diukur dengan indikator yaitu Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi. Pencapaian Kinerja sasaran pada tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi telah mencapai target yang telah ditentukan. Adapun hasil ini dapat dijelaskan dari formula sebagai berikut:

Adapun hasil ini dapat dijelaskan dari formula sebagai berikut:

$\frac{\text{Jumlah kegiatan penguatan infrastruktur demokrasi yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan penguatan infrastruktur demokrasi yang direncanakan}} \times 100$
--

$$= \frac{2 \text{ Kegiatan}}{2 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 100\%$$

Sesuai dengan surat dari Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI tanggal 28 April 2021 Nomor : 910/3037/Polpum, dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pemilukada Tahun 2024, disampaikan program dan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri, sebagai berikut :

1. Pendidikan Politik bagi Partai Politik dan Masyarakat;
2. Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
3. Gerakan kemitraan bersama Organisasi Kemasyarakatan Sipil dan Perguruan Tinggi mensukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024;
4. Pembinaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Forum Komunikasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan (FORKOPIMCAM);
5. Pembumian Nilai – Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat mendukung Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak Tahun 2024;
6. Forum Komunikasi Sosial Politik Dalam Rangka Cipta Kondisi Sukses Pemilu Serentak 2024;
7. Pembentukan dan Operasionalisasi Tim Pemantauan dan Mobev Penyelenggaraan dan Tahapan Pemilu Serentak 2024 (Desk Pemilu dan Pilkada);
8. Penguatan Iklan Layanan Pendidikan Politik.

Upaya yang dilakukan demi terwujudnya sasaran strategis “Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi” pada tahun 2023 adalah dilaksanakan Sosialisasi Pendidikan Politik kepada pemilih pemula, pemilih

perempuan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pilkada serentak pada Tahun 2024 yang dilaksanakan di SMAN 1 Kesamben dengan narasumber dari Bawaslu Kab. Blitar dan KPU Kab. Blitar. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, dimana organisasi masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam percepatan pembangunan dan termasuk salah satu aspek infrastruktur demokrasi.

d. Target dan realisasi Sasaran Strategis 4 :

Sasaran Strategis 4 :

Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar

IKU	Realisasi		Capaian 2023		
	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kabupaten Blitar	BB (78,99)	BB (71,39)	BB (75)	BB (75,16)	100,2%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2023					100,2%

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB RI Nomor 88 Tahun 2021, Nilai SAKIP Perangkat Daerah didapatkan dari hasil evaluasi AKIP yang secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Sasaran strategis “Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar” ini dijalankan dengan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pencapaian dari sasaran strategis ini diukur dengan indikator yaitu Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kabupaten Blitar. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pada Tahun 2023 nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kabupaten Blitar sebesar 75,16 dari target 75, sehingga presentase pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2023 sebesar 100,2%. Hal ini

menunjukkan bahwa Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi telah mencapai target yang telah ditentukan dengan predikat BB yang menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar “Sangat Baik”.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026 dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah SKPD. Perbandingan antara Target Akhir Renstra 2026 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dapat tersaji pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RENSTRA

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa	Indeks Kesalehan Sosial	90	84,43	93,6%
2.	Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	95%	90%	94,7%
3.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi	Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi	80%	75%	93,75%
4.	Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar	Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kab. Blitar	BB (75,9)	BB (75,16)	99%

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Dalam pemenuhan target Indikator Kinerja Utama tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi sebagai berikut :

- Generasi umur 6 - 25 tahun belum seluruhnya memahami Pancasila dan wawasan kebangsaan serta akses terhadap informasi yang cepat dan tanpa batas (tanpa ada saringan ideologi) mengakibatkan intoleransi terhadap paham tertentu yang dapat melunturkan semangat kebhinekaan
- Kurangnya akuntabilitas partai politik dalam pengelolaan bantuan hibah partai politik
- Kurangnya pemahaman politik bagi masyarakat Kabupaten Blitar
- Kurangnya akuntabilitas kelembagaan dan keuangan organisasi masyarakat dan terdapat sengketa organisasi masyarakat yang belum terselesaikan
- Masih sering terjadinya konflik horizontal di masyarakat yang berkaitan dengan IPOLEKSOBUD, pada tahun 2022 terjadi 7 kasus yang dapat diselesaikan. Adapun ada beberapa konflik sosial yang terjadi selama 2022 munculnya wabah PMK, permasalahan Padepokan Nur Dzat Sejati, permasalahan perkebunan Branggah Banaran PT Perkebunan Tjengkeh, permasalahan redistribusi tanah dan pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2022 di Kabupaten Blitar yang memiliki kerawanan konflik yang tinggi

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan tersebut di atas adalah :

- Pemupukan jiwa kepahlawanan melalui Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Sosialisasi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada pelajar.
- Workshop administrasi kelembagaan dan keuangan bagi pengurus partai politik, Verifikasi dan monitoring partai politik, Konsultasi dan koordinasi kelembagaan partai politik

- Peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan politik dan kehidupan politik melalui sosialisasi dan perluasan informasi publik.
- Pemberdayaan organisasi masyarakat melalui workshop keuangan dan pelatihan administrasi bagi pengurus organisasi masyarakat, fasilitasi sengketa ormas, pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas, dan Verifikasi dan monitoring ormas.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini serta penanggulangan terhadap potensi ATHG

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara hasil capaian kinerja yang dibandingkan dengan anggaran yang diserap. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat melalui penyajian tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 3. 4 Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa	Indeks Kesalehan Sosial	1.605.599.750	3,60%
2.	Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	782.702.000	1,76%
3.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi	Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi	39.023.481.200	87,56%
4.	Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar	Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kab.Blitar	3.154.992.370	7,08%

Total anggaran belanja langsung pada Bakesbangpol Kabupaten Blitar tahun 2023 sebesar Rp. 44.566.775.320,- dari total anggaran tersebut dibagi kedalam 4 (empat) sasaran strategis sesuai dengan prioritas pada tahun 2023. Sasaran strategis 1 : “Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa” porsi sebesar 3,60% atau sebesar Rp 1.605.599.750,-. Sasaran strategis 2 : “Tingkat penanganan konflik sosial di Masyarakat” mendapat porsi anggaran sebesar 1,76% atau sebesar Rp. 782.702.000,-. Sasaran strategis 4 : “Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar” mendapat porsi sebesar 7,08% atau sebesar Rp. 3.154.992.370,-.

Sementara itu sasaran strategis “Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi” mendapatkan paling tinggi porsi sebesar 87,56% atau sebesar Rp 39.023.481.200,- hal ini dikarenakan pada tahun 2023 terdapat kegiatan penyaluran bantuan hibah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, bantuan hibah kepada organisasi masyarakat serta instansi vertikal di Kabupaten Blitar, serta bantuan hibah kepada lembaga penyelenggara Pemilu. Selain itu terkait upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada pada tahun ini digalakkan melalui kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula dan perempuan yang bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Blitar dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Blitar guna mendukung sukses Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Tabel 3. 5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa	Indeks Kesalehan Sosial	84	84,23	100,27 %	1.605.599.750	1.591.067.260	99,09%
2.	Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat	Tingkat penanganan konflik sosial di Masyarakat	90%	90%	100%	782.702.000	756.716.000	96,68%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi	Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi	75%	75%	100%	39.023.481.200	39.005.999.326	99,96%
4.	Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar	Nilai SAKIP pada Bakesbangpol 1 Kab. Blitar	BB (75)	BB (75,16)	100,2 %	3.154.992.370	3.008.867.726	95,37%

Adapun perhitungan efisiensi anggaran dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu anggaran keluaran i

RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i

CK_i : Capaian keluaran i

Tabel 3. 6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Capaian kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa	Indeks Kesalehan Sosial	100,27%	99,09%	1,17%
2.	Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	100%	96,68%	3,32%
3.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi	Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi	100%	99,96%	0,04%
4.	Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar	Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kab. Blitar	100,2%	95,37%	4,82%

Pada tabel 3.6 di atas, disajikan mengenai tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada setiap sasaran strategis meskipun tidak terlalu signifikan. Pada sasaran strategis 1 “Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa” terealisasi sebesar Rp. 1.591.067.260 (99,09%) dari anggaran sebesar Rp. 1.605.599.750 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 1,17%. Pada sasaran strategis 2 “Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat” terealisasi sebesar Rp. 756.716.000 (96,68%) dari anggaran sebesar Rp. 782.702.000 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 3,32%. Pada sasaran strategis 3 “Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi” terealisasi sebesar Rp. 39.005.999.326 (99,96%) dari anggaran sebesar Rp. 39.023.481.200 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0,04%. Sementara itu Pada sasaran strategis 4 “Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar” terealisasi sebesar Rp. 3.008.867.726 (95,37%) dari anggaran sebesar Rp. 3.154.992.370 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 4,82%

6. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Dukungan dari berbagai instansi untuk menunjang keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh bakesbangpol sangat diperlukan, mengingat stabilitas daerah kinerjanya tidak tampak tapi bisa dirasakan. Bila Bakesbangpol berhasil dalam melaksanakan kegiatannya akan berdampak sistemik kepada kondisi keamanan di Kabupaten Blitar.

Faktor penunjang dalam keberhasilan Bakesbangpol dalam menjalankan kegiatannya antara lain:

- Dukungan dana dari pemerintah daerah yang seluruh kegiatan Bakesbangpol dibiayai oleh APBD Kabupaten Blitar
- Sumberdaya organisasi yang mampu bersinergis dengan jajaran samping, pemangku kepentingan dan stake holder
- Efektifitas penggunaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan

Permasalahan dan tantangan:

- 1) Tantangan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu terutama bagi pemilih perempuan dan pemilih pemula.
- 2) Heterogenitas dan semangat primordialisme masyarakat yang rentan terjadi benturan.
- 3) Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada:

- 1) Mengoptimalkan peran forum-forum (FKDM, Tim Wasdin, FKUB dan FPK) yang ada dari tingkat Kabupaten sampai tingkat desa/kelurahan untuk mengantisipasi potensi timbulnya gejolak di masyarakat yang dapat mengganggu kondusivitas daerah.
- 2) Meningkatkan kegiatan FKUB (forum kerukunan umat beragama) dan FPK (forum Pembauran Kebangsaan) ke arah pemberdayaan organisasi yang dapat mengubah perberdaan menjadi keunggulan kompetitif.
- 3) Melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap berbagai hal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
- 4) Mengefektifkan peran Tim Koordinasi dan Pokja P4GN di Kabupaten Blitar.
- 5) Fasilitasi pelaksanaan sosialisasi pemilu dengan bekerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) guna mendukung dan menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024.

B. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar didukung dengan anggaran yang memadai, baik jumlahnya maupun kelancaran pencairannya. Pada Tahun Anggaran 2022 sumber dana untuk Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar berasal dari anggaran APBD termasuk PAK adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Anggaran dan Realisasi Belanja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja pegawai	2.446.110.500	2.330.581.214	95,28	2.398.607.120	2.276.136.520	94,89
Belanja barang dan jasa	1.971.773.280	1.874.314.153	95,06	3.975.963.000	3.896.255.466	98,00
Belanja Hibah	6.324.449.000	4.839.449.000	76,52	38.192.205.200	38.190.258.326	99,99
Belanja modal dan peralatan dan mesin	0	0	0	0	0	0
Belanja modal gedung dan bangunan	0	0	0	0	0	0
Jumlah	10.742.332.780	9.044.344.367	84,19	44.566.775.320	44.362.650.312	99,54

Anggaran tahun 2023 pada Bakesbangpol Kabupaten Blitar adalah sebesar Rp. 44.566.775.320,- anggaran tersebut digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp. 2.398.607.120,- , belanja barang dan jasa sebesar Rp. 3.975.963.000,- dan belanja hibah kepada parpol, ormas, instansi vertikal dan lembaga penyelenggara Pemilu sebesar Rp. 38.192.205.200,-. Dari anggaran tersebut terealisasi Rp. 44.362.650.312,- atau sekitar 99,54%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 jumlah anggaran Rp. 10.742.332.780,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.044.344.367,- atau sekitar 84,19%, pada tahun 2023 terdapat peningkatan realisasi anggaran pada Bakesbangpol Kab. Blitar.

Tabel 3. 8 Pagu Anggaran dan Realisasi Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.154.992.370	3.008.867.726	95,37
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.380.000	30.380.000	100
1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.380.000	30.380.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.434.601.120	2.296.440.520	94,33
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.356.607.120	2.219.724.232	94,19

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.836.000	42.836.000	100
2.2	Koordinasi pelaksanaan akuntansi SKPD	35.158.000	35.158.000	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.684.000	19.604.000	99,59
3.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16.144.000	16.144.000	100
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.540.000	3.460.000	97,74
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	343.886.683	338.575.806	98,46
4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.733.683	123.142.856	99,52
4.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.153.000	215.432.950	97,86
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.068.967	252.426.000	99,35
5.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	254.068.967	252.426.000	99,35
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.371.600	71.441.400	98,71
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.371.600	71.441.400	98,71
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.345.132.750	1.332.433.000	99,06
1	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	1.345.132.750	1.332.433.000	99,06
1.1	8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.213.405.000	1.201.605.500	99,03
1.2	8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Sejarah Kebangsaan	131.727.750	130.827.500	99,32
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	260.467.000	258.634.260	99,30
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	260.467.000	258.634.260	99,30



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.1	8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	72.872.000	71.777.260	98,50
1.2	8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	181.385.000	180.647.000	99,59
1.3	8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6.210.000	6.210.000	100,00
IV	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	782.702.000	756.716.000	96,68
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	782.702.000	756.716.000	96,68
1.1	8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	467.472.000	456.219.000	97,59
1.2	8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	23.700.000	23.600.000	99,58

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.3	8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	291.530.000	276.897.000	94,98
V	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	35.809.011.200	35.793.476.200	99,96
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	35.809.011.200	35.793.476.200	99,96
1.1	8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	299.869.500	285.655.000	95,26
1.2	8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	51.365.000	50.045.000	97,43
1.3	8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	35.457.776.700	35.457.776.200	100
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	3.214.470.000	3.212.523.126	99,94

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3.214.470.000	3.212.523.126	99,94
1.1	8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	35.060.000	35.060.000	100
1.2	8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.179.410.000	3.177.463.126	99,94
Total		44.566.775.320	44.362.650.312	99,54

Pada tahun 2023, Bakesbangpol menjalankan 6 Program 11 kegiatan dan 22 sub kegiatan dalam capaian kegiatan untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar "*Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur)*", Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten mengemban tugas untuk menciptakan stabilitas di bidang IPOLEKSOSBUD yang merupakan salah satu daya tarik investasi.

Dari tabel 3.8 dapat kita lihat bahwa anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2023 sebesar Rp. 44.566.775.320,- dan terealisasi sebesar Rp. 44.362.650.312,- atau sekitar 99,54%.

a. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 1

Sasaran 1 "Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa" dengan indikator Indeks Kesalehan Sosial diampu oleh 2 program yaitu Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dan Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya. . Realisasi program kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Indeks Kesalehan Sosial, sebagai berikut :



Tabel 3. 9 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
untuk Sasaran Strategis 1 Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ALOKASI BIAYA			KELUARAN (OUTPUT)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
I	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.345.132.750	1.332.433.000	99,06	Persentase Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	80%	80%
1	Perumusan kebijakan teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	1.345.132.750	1.332.433.000	99,06	Persentase kegiatan pementapan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang dilaksanakan	80%	80%
1.1	8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.213.405.000	1.201.605.500	99,03	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350 orang	350 orang
1.2	8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	131.727.750	130.827.500	99,32	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 orang	100 orang
II	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	260.467.000	258.634.260	99,30	Persentase Kebijakan Teknis Dan Pementapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang dilaksanakan	80%	80%
2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	260.467.000	258.634.260	99,30	Persentase Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dihasilkan	80%	80%
2.1	8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	72.872.000	71.777.260	98,50	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	150 orang	150 orang



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ALOKASI BIAYA			KELUARAN (OUTPUT)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				Penghayat Kepercayaan di Daerah		
2.2	8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	181.385.000	180.647.000	99,59	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 orang	200 orang
2.3	8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6.210.000	6.210.000	100	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	7 laporan	7 laporan

I. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, dimana program ini mengampu sasaran 1 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu meningkatnya Indeks Kesalehan Sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa, dengan harapan adanya kegiatan pemantapan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dapat meningkatkan Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Blitar.

- Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan,**
Kegiatan ini dilaksanakan melalui dua sub kegiatan sebagai berikut :



1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Pada tahun 2023, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.213.405.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.201.605.500,- atau 99,03%. Dalam rangka meningkatkan semangat kebhinekaan masyarakat Kabupaten Blitar dilaksanakan melalui fasilitasi kegiatan :

- 1) Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) mencakup kegiatan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Rangkaian Upacara Peringatan HUT RI Ke-77, Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Upacara Peringatan Hari Bela Negara.
- 2) Pemantapan ideologi Pancasila dan kebhinekaan melalui sosialisasi wawasan kebangsaan. Pada Tahun 2022, kegiatan sosialisasi Wawasan Kebangsaan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali kepada Calon Paskibraka Kabupaten Blitar Tahun 2023 dan Paskibraka Kabupaten Blitar Tahun 2023 melalui kolaborasi bersama Jejaring Panca Mandala Penataran Kabupaten Blitar Jejaring Panca Mandala terdiri dari 5 unsur yaitu :
 - a) Pemerintah Daerah;
 - b) UMKM/ Dunia Usaha;
 - c) Akademisi;
 - d) Organisasi Masyarakat;
 - e) Media Massa/ Pers
- 3) Fasilitasi Kegiatan Paskibraka meliputi pembentukan, pelaksanaan tugas, pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purna Paskibraka Duta

Pancasila, pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purna paskibraka.



Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke 115 dengan mengusung tema “Semangat Untuk Bangkit” tanggal 22 Mei 2023 bertempat di Aloon – Aloon Pemkab Blitar di Kanigoro.



Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dengan mengusung tema “Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global” tanggal 1 Juni 2023 bertempat di Aloon – Aloon Pemkab Blitar di Kanigoro.



Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju” tanggal 1 Oktober 2023 bertempat di Aloon – Aloon Pemkab Blitar di Kanigoro.



Rangkaian kegiatan dalam memperingati HUT Ke-78 RI Tahun 2023 pada dengan megusung tema “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju” tanggal 17 Agustus 2023 bertempat di Aloon – Aloon Pemkab Blitar di Kanigoro.



Peringatan Hari Bela Negara Ke-75 Tahun 2023 dengan mengusung tema “Kobarkan Bela Negara Untuk Indonesia Maju” tanggal 19 Desember 2023 bertempat di Aloon – Aloon Pemkab Blitar di Kanigoro.



Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Blitar Tahun 2023 bertempat di LEC Garum.



Pelaksanaan Seleksi Calon Paskibraka Kabupaten Blitar Tahun 2023 bertempat di Gedung Serbaguna Pemkab Blitar



Pembukaan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Calon Paskibraka Kabupaten Blitar Tahun 2023 bertempat di Ruang Rapat Perdana Pemkab Blitar



Pelatihan Calon Paskibraka Kabupaten Blitar Tahun 2023 bertempat di Aloon-Aloon Pemkab Blitar Kanigoro Ruang Rapat Perdana Pemkab Blitar



Pengukuhan Paskibraka Kabupaten Blitar Tahun 2023 oleh Bupati Blitar di Pendopo Ronggo Hadi Negoro.

1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Pada tahun 2023, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 131.727.750,- dan terealisasi sebesar Rp.

130.827.500,- atau 99,32%. Pada sub kegiatan ini dilaksanakan fasilitasi kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Blitar. Kegiatan fasilitasi FPK tersebut berupa :

- 1) Rapat kelembagaan FPK Kabupaten Blitar;
- 2) Rapat membahas isu - isu strategis terkait pembauran kebangsaan di Kabupaten Blitar;
- 3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan FPK Kabupaten Blitar melalui studi tiru ke FPK Kabupaten Banyuwangi;
- 4) Parade Surya Senja oleh Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Blitar dalam rangkaian kegiatan peringatan HUT RI Ke-78

Selain itu pada sub kegiatan ini juga dilaksanakan kegiatan fasilitasi Kampung Pancasila dan Jejaring Panca Mandala.



Peningkatan Kapasitas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Blitar ke FPK Kabupaten Banyuwangi



Peningkatan Kapasitas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) serta kunjungan kerja dari Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Situbondo



Parade Surya Senja persembahkan FPK Kabupaten Blitar sebagai rangkaian peringatan HUT RI Ke-78 Tahun 2023



Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh Jejaring Panca Mandala Kabupaten Blitar Tahun 2023 bertempat di Ruang Rapat Candi Penataran Pemkab Blitar

II. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, dimana program ini mengampu sasaran 1 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu meningkatnya Indeks Kesalehan Sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa, dengan adanya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan agama serta keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Blitar diharapkan dapat meningkatkan Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Blitar.

2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

2.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah

Pada tahun 2023, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 72.872.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 71.777.260,- atau 98,50%. Pada sub kegiatan ini meliputi kegiatan :

- 1) Pelaksanaan operasi gabungan narkoba berkerjasama dengan BNN Kabupaten Blitar.
- 2) Pembinaan Desa Bersinar di Desa Tingal Kec. Garum
- 3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan FKUB Kabupaten Blitar melalui studi tiru ke FKUB Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Bangli;

2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah

Pada tahun 2023, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 181.385.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 180.647.000,- atau 99,59%. Pada sub kegiatan ini meliputi kegiatan :

- 1) Rapat koordinasi dan sosialisasi bahaya narkoba bekerjasama dengan BNN Kabupaten Blitar;
- 2) Rapat kelembagaan FKUB;
- 3) Rapat dukungan stabilitas dalam rangka perayaan hari besar keagamaan
- 4) Rakor stabilitas ekonomi sosial, budaya dan agama terutama dalam kesiapsiagaan pangan, budaya dan agama

2.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah

Pada tahun 2023, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 6.210.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.210.000,- atau 100%. Pada sub kegiatan ini meliputi kegiatan :

- 1) Monitoring, evaluasi dan advokasi ketahanan keluarga anti Narkoba di Desa Tingal Garum, bekerjasama dengan BNN dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2) Pendataan penghayat kepercayaan
- 3) Pemantauan eks pengguna narkoba (bekerjasama dengan Dinkes)



Peningkatan Kapasitas dan Studi Tiru Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Blitar ke Kabupaten Jember dan Kabupaten Bangli



Rapat Koordinasi dan Kelembagaan FKUB Kabupaten Blitar tanggal 11 Oktober 2023 bertempat di Kantor FKUB Kabupaten Blitar



Monitoring, evaluasi dan advokasi ketahanan keluarga anti Narkoba di Desa Tingal Garum, bekerjasama dengan BNN dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

b. Realisasi Anggaran untuk Sasaran Strategis 2

Sasaran strategis 2 “Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat” dengan indikator kinerja Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat diampu oleh 1 program yaitu Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Realisasi program kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat, sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Sasaran Strategis 2 Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ALOKASI BIAYA			KELUARAN (OUTPUT)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
I	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	782.702.000	756.716.000	96,68	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	90%	90%
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	782.702.000	756.716.000	96,68	Persentase kegiatan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	90%	90%
1.1	8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	467.472.000	456.219.000	97,59	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 orang	150 orang
1.2	8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	23.700.000	23.600.000	99,58	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	8 laporan	8 laporan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ALOKASI BIAYA			KELUARAN (OUTPUT)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
	Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
1.3	8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	291.530.000	276.897.000	94,98	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen

I. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, dimana program ini mengampu sasaran 2 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah.

Pada tahun 2023, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 467.472.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 456.219.000,- atau 97,59%. Pada sub kegiatan ini, dilaksanakan kegiatan pencegahan konflik berupa fasilitasi Forum Kewaspadaan dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah, pemantauan orang asing, pulbaket deteksi dini konflik di bidang IPOLEKSOSBUD dan fasilitasi kerjasama intelijen.

Pada tahun 2023 jumlah kejadian yang menonjol yang terjadi sebanyak 11 kejadian dan dari 11 kejadian tersebut semuanya dapat terselesaikan dengan mediasi dan koordinasi dengan pihak – pihak terkait. Adapun kejadian menonjol pada tahun 2023 adalah permasalahan redistribusi tanah Perkebunan Brangghah Banaran, ledakan bahan petasan di salah satu rumah warga Desa Karangbendo, Kec. Ponggok yang mengakibatkan kerusakan rumah disekitarnya dan warga Kel. Babadan, Kec. Wlingi didampingi oleh LSM GPI yang mengeluhkan keberadaan Tower Telekomunikasi milik PT. Dayamitra Telekomunikasi karena dampak buruk keberadaan tower dan meminta agar perijinan tower dicabut, penolakan perobohan tugu pencak silat, aksi unjuk rasa oleh Masyarakat Peduli Kabupaten Blitar yang menuntut ditutupkan tambang ilegal di Blitar Selatan dan Kejadian Orang Meninggal Dunia di Kamar Mandi Umum Pondok Nuswantoro (Dulu bernama Padepokan Nur Dzat Sejati) pimpinan Sdr. Samsudin. Namun dengan kesigapan bidang pencegahan konflik, kejadian menonjol dan berpotensi konflik tersebut dapat dicegah dengan cara mediasi dengan pihak yang bertikai sehingga tidak sampai menimbulkan keresahan di masyarakat.



Rapat Koordinasi FKDM terkait penyusunan Ranperbup Pedoman Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Masyarakat bertempat di ruang Rapat Bakesbangpol



Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Blitar



Pencegahan Konflik melalui komunikasi psikologis antara pemerintah, ormas dan instansi vertikal

1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah

Pada tahun 2023, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 23.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.600.000,- atau 99,58%. Pada sub kegiatan dilaksanakan kegiatan penanganan konflik berupa fasilitas kegiatan tim stabilitas daerah dan tim terpadu penanganan konflik, serta pulbaket untuk pengambilan kebijakan prakonflik, saat konflik dan pasca konflik.

Pada tahun 2023, juga dilaksanakan kegiatan audiensi penanganan konflik yang menghadirkan pihak yang bersengketa dan OPD terkait. Melalui kegiatan audiensi dan mediasi tersebut konflik sosial yang ada di Kabupaten Blitar dapat diselesaikan dan tidak sampai menimbulkan keresahan yang berlanjut di masyarakat



Penanganan konflik dilakukan melalui pendekatan komunikasi sosial dengan pihak yang bertikai untuk mencegah tindakan destruktif yang kiranya mengganggu stabilitas wilayah



Rapat Koordinasi terkait permasalahan perkebunan Branggah Banaran bertempat di Ruang Rapat Perdana

1.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2023, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 291.530.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 276.897.000,- atau 94,98%. Pada sub kegiatan dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi antar pimpinan daerah di Kabupaten Blitar terkait penanganan konflik di Kabupaten Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menghasilkan perjanjian damai, pakta integritas, nota kesepakatan, Surat Keputusan dari Pihak/Lembaga yang berwenang, dan lain- lain. Pada tahun 2023 dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Forkompimda Kabupaten Blitar terkait Pengamanan Hari Raya Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 Menjelang Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

c. Realisasi Anggaran untuk Sasaran Strategis 3

Sasaran strategis “Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi” dengan indikator kinerja Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi diampu oleh 2 (dua) program yaitu : Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dan Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Berikut merupakan realisasi program dan kegiatan telah dilaksanakan pada tahun 2023 :

Tabel 3. 11 Realisasi Program dan Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pilkada

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			KELUARAN (OUTPUT)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
I	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	35.809.011.200	35.793.476.200	99,96	Presentase kegiatan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik yang dilaksanakan	75%	75%
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	35.809.011.200	35.793.476.200	99,96	Persentase kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik	75%	75%
1.1	.01.03.2.01.03 Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	299.869.500	285.655.000	95,26	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 orang	200 orang

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			KELUARAN (OUTPUT)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.2	8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	51.365.000	50.045.000	97,43	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	130 orang	130 orang
1.3	8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	35.457.776.700	35.457.776.200	100	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 laporan	2 laporan
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	3.214.470.000	3.212.523.126	99,94	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	27%	27%
2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3.214.470.000	3.212.523.126	99,94	Persentase ormas yang dibina	27%	27%
2.1	8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	35.060.000	35.060.000	100	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	90 orang	90 orang
2.2	8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.179.410.000	3.177.463.126	99,94	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 laporan	10 laporan



I. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, dimana program ini mengampu Sasaran 3 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

Pada tahun 2023, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 299.869.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 285.655.000,- atau 95,26%.

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan kegiatan :

- 1) Pemberdayaan partai politik melalui workshop keuangan;
- 2) Bimbingan teknis kepada fungsionaris partai politik;
- 3) Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula dan perempuan. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan sasaran pemilih pemula dan perempuan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024. Pada Tahun 2023 kegiatan pendidikan sosialisasi pendidikan politik dilaksanakan di SMAN 1 Kesamben dengan narasumber dari Bawaslu Kab. Blitar dan KPU Kab. Blitar.



Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 tanggal 11 Agustus 2023 di SMAN 1 Kesamben



Bimbingan Teknis Implementasi SIPD RI kepada parpol dan ormas penerima Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 tanggal 6 Maret 2023

1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Pada tahun 2023, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 51.365.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.045.000,- atau 97,43%. Pada sub kegiatan dilaksanakan kegiatan berupa :

- 1) Pemberdayaan partai politik melalui komunikasi politik antara masyarakat dan Pemerintah
- 2) Fasilitasi Tim Pemantauan dan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024
- 3) Forum Komunikasi Sosial Politik Dalam Rangka Cipta Kondisi Sukses Pemilu Serentak 2024
- 4) Fasilitasi dan koordinasi kelembagaan penyelenggara Pemilu;



Rakor Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2023 bertempat di Ruang Rapat Bakesbangpol Kab. Blitar

1.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Pada tahun 2023, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 35.457.776.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.457.776.200,- atau 100%. Pada sub kegiatan dilaksanakan

kegiatan berupa verifikasi dan monitoring dan penyaluran dana hibah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD serta hibah kepada lembaga penyelenggara Pemilu dan sudah terealisasi 100%. Dimana di Kabupaten Blitar terdapat 9 parpol yang mendapatkan bantuan dana hibah pada Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel Rincian Dana Hibah Kepada Partai Politik Tahun 2023

No.	Nama Parpol	Dana Hibah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Rp. 174.229.500,-
2.	Partai Gerindra	Rp. 272.523.000,-
3.	PDI Perjuangan	Rp. 751.710.000,-
4.	Partai Golkar	Rp. 142.608.000,-
5.	Partai Nasdem	Rp. 46.693.000,-
6.	PKS	Rp. 55.686.000,-
7.	PPP	Rp. 47.163.000,-
8.	PAN	Rp. 278.643.000,-
9.	Partai Demokrat	Rp. 98.466.000,-
Total		Rp. 2.092.644.000,-

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2023

Tabel Rincian Dana Hibah Kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu Tahun 2023

No.	Nama Lembaga	Dana Hibah
1.	KPU Kabupaten Blitar	Rp. 7.356.561.200,-
2.	Bawaslu Kabupaten Blitar	Rp. 25.600.000.000,-
Total		Rp. 32.956.561.200,00,-



Penandatanganan NPHD Antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Blitar untuk fasilitasi Pilkada 2024

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, dimana program ini mengampu sasaran 3 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi. Organisasi masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam percepatan pembangunan dan termasuk salah satu aspek infrastruktur demokrasi, untuk dilaksanakan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

2.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Pada tahun 2023, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 35.060.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.060.000,-

atau 100%. Sebagai mitra pemerintah dalam percepatan pembangunan, organisasi kemasyarakatan (ormas) diharapkan memiliki kelembagaan yang akuntabel sehingga tujuan ormas dapat diwujudkan. Output kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- 1) Pemberdayaan ormas melalui workshop keuangan dan pelatihan administrasi bagi pengurus ormas
- 2) Konsultasi dan koordinasi kelembagaan ormas
- 3) Deklarasi Damai Perguruan Pencak Silat Se-Kabupaten Blitar Bersama Forkopimda dalam mewujudkan stabilitas wilayah di Kabupaten Blitar;
- 4) Forum komunikasi ormas dalam rangka cipta kondisi sukses Pemilu serentak tahun 2024



Sinergitas dan Deklarasi Damai Perguruan Pencak Silat Se-Kabupaten Blitar Bersama Forkopimda dalam mewujudkan stabilitas wilayah di Kabupaten Blitar tanggal 10 April 2023 bertempat di Pendopo Ronggo Hadi Negro

2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Pada tahun 2023, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 35.060.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.060.000,- atau 100%. Pada sub kegiatan ini dilaksanakan kegiatan :

- 1) Verifikasi dan monitoring hibah ormas
- 2) Verifikasi dan monitoring hibah instansi vertial
- 3) Fasilitasi rapat koordinasi sengketa ormas;
- 4) Penyaluran dana hibah kepada ormas dan instansi vertikal

Pada tahun 2023, di Kabupaten Blitar terdapat 4 instansi vertikal dan 11 ormas yang mendapatkan bantuan dana hibah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Dana Hibah Kepada Instansi Vertikal Tahun 2023

No.	Nama Lembaga	Peruntukan	Besaran	Keterangan
1.	POLRES BLITAR	Operasi ketupat tahun 2023, Operasi Lilin Tahun 2023, Giat Binmas Silaturahmi Kamtibmas, Giat Intelijen Cipkon Menjelang Pemilu 2024, Videotron, Soundsystem, CCTV Lokal, Poliklinik, Sewa kendaraan operasional Kapolres Blitar	1.078.000.000	Terealisasi sebesar Rp. 1.0746.503.126 (terdapat pengembalian sebesar Rp.1.496.874 dikarenakan terjadi selisih harga antara perkiraan dan harga di lapangan)
2.	PANGKALAN TNI AU PONGGOK	Gedung Mess	500.000.000	
3.	POLRES BLITAR KOTA	Meubeler dan Rehab Ruang Kerja	150.000.000	
4.	KODIM 0808	Kegiatan PAM	340.000.000	
Total			2.068.000.000	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2023

**Tabel Rincian Dana Hibah Kepada Organisasi Masyarakat
Tahun 2023**

No.	Nama Lembaga	Peruntukan	Besaran	Keterangan
1.	RANTING NU DESA BUMIREJO	NU Centre	100.000.000	
2.	GP ANSOR KEC. PANGGUNGREJO	Seragam banser	30.000.000	
3.	PAC GP ANSOR SUTOJAYAN	Seragam banser	30.000.000	
4.	PP POLRI	Operasional kantor, HUT, Halal Bihalal	75.000.000	
5.	PC PMII KAB. BLITAR	Konfercab	30.000.000	
6.	LP MAARIF WONODADI	Seragam	100.000.000	
7.	MUSLIMAT RANTING PENATARAN	Tikar	100.000.000	
8.	FATAYAT KEC. NGLEGOK	Mobil	230.000.000	
9.	MWC NU KEC. KANIGORO	Mobil	200.000.000	
10.	MDMC	Perahu karet, dll	85.000.000	Terealisasi sebesar Rp. 84.550.000 (terdapat pengembalian sebesar Rp. 450.000, dikarenakan terjadi selisih harga antara perkiraan dan harga di lapangan)
11.	AISIAH	Kegiatan 3 bulan	95.000.000	
Total			1.075.000.000	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2023

Pada tahun 2023, jumlah organisasi masyarakat yang mencatatkan diri di Bakesbangpol Kabupaten Blitar adalah 133 terdiri dari 128 ormas berbadan hukum (AHU) dan 5 ormas yang tidak berbadan hukum (memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kemendagri RI)

**Tabel Jumlah Ormas Berbadan Hukum yang mencatatkan diri
di Bakesbangpol Kabupaten Blitar**

No	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Jumlah ormas	15	7	8	7	12	19	17	14	128



Pada tahun 2023, di Kabupaten Blitar terdapat penambahan 14 ormas berbadan hukum baru yang mencatatkan diri ke Bakesbangpol Kabupaten Blitar sehingga total ormas berbadan hukum (AHU) yang mencatatkan diri ke Bakesbangpol Kabupaten Blitar sampai tahun 2023 adalah 128 ormas.

Tabel Jumlah Ormas Tidak Berbadan Hukum yang mencatatkan diri di Bakesbangpol Kabupaten Blitar

No	2020	2021	2022	2023	Total
Jumlah ormas	1	2	1	1	5

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2023

Selain itu juga terdapat penambahan 1 ormas tidak berbadan hukum (memiliki Surat Keterangan Terdaftar/SKT dari Kemendagri RI) yang mencatatkan diri ke Bakesbangpol Kab. Blitar, sehingga total ormas yang tidak berbadan hukum yang mencatatkan diri ke Bakesbangpol sampai dengan tahun 2023 adalah 5 ormas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara global hasil pelaksanaan program/kegiatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar tahun 2023 ditinjau dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar menunjukkan telah tercapainya indikator sasaran dari 4 (empat) sasaran strategis yang mencakup 4 (empat) indikator sasaran. ditinjau dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar menunjukkan telah tercapainya semua sasaran strategis yang telah ditargetkan, sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 99,54% meskipun masih dijumpai adanya beberapa permasalahan, kendala dan kelemahan yang masih memerlukan peningkatan serta perbaikan di masa yang akan datang

B. Saran

1. Untuk mencapai tingkat keberhasilan pembangunan yang semaksimal mungkin, maka ke depan diperlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain. Pelaksanaan kegiatan perlu dilandasi integritas dan dedikasi tinggi dari aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar;

2. Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Blitar tergantung pada partisipasi seluruh stakeholders, maka faktor kerja sama dan koordinasi sangat diperlukan sedini mungkin yaitu sejak tahap perencanaan yang terus dikembangkan secara serasi pada tahap pelaksanaan serta pengawasan.

Blitar, 29 Februari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BLITAR

Ir. SETIYANA, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680810 199703 1 003



2. Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Blitar tergantung pada partisipasi seluruh stakeholders, maka faktor kerja sama dan koordinasi sangat diperlukan sedini mungkin yaitu sejak tahap perencanaan yang terus dikembangkan secara serasi pada tahap pelaksanaan serta pengawasan.

Blitar, 29 Februari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BLITAR



Ir. SETIYANA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 199703 1 003

